

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 80 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TUBAN TAHUN  
2022.

---

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renja SKPD Tahun 2022 ini berupa perencanaan tahun kedua dari pelaksanaan RENSTRA SKPD Tahun 2021- 2026, sebagai perodesasi lanjutan pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun kedepan.

Renja SKPD merupakan dokumen yang ditetapkan berkala setiap tahun melalui Peraturan Bupati, dan berfungsi sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih spesifik lagi. Renja SKPD akan diuraikan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), kemudian Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) yang berisi Program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada Tahun Anggaran 2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Ketatalaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005–2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1.3.1 MAKSUD

- a) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- b) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

#### 1.3.2 TUJUAN

Sedangkan tujuan penyusunan Renja SKPD ini adalah:

- a) Memberikan arahan kegiatan instansi pemerintah pada tahun 2022;
- b) Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021;

- c) Dengan perencanaan kerja yang jelas dan sistematis, maka satuan kerja akan bergerak secara konsisten, eksis, antisipatif, produktif dan inovatif serta memiliki arah dan fokus yang jelas yang akan mempermudah pencapaian tujuan satuan kerja;
- d) Menjadi alat ukur yang pasti atas kinerja penyelenggaraan fungsi satuan kerja perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD;
- e) Menjadi acuan penyusunan laporan dan evaluasi SKPD;
- f) Sebagai alat pacu peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah karena mempermudah pembinaan dan pendayagunaan aparatur;
- g) Sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2022 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

##### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi bidang tugasnya. Evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauh mana satuan kerja bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan segala daya yang ada serta mengedepankan konsistensi, efisiensi, produktif dan inovatif. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana organisasi berjalan sesuai pada relnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan, serta hasil laporan kinerja sampai tahun 2021. Adapun evaluasi Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2021 sebagaimana tertera pada tabel 2.1.1 berikut:

Tabel 2.1.1  
Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi	Tingkat Capaian 2021	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Prosentase Potensi Konflik Agama yang terselesaikan	70	100	142%	100%
	Prosentase Potensi Konflik Sosial dan Politik yang terselesaikan	70	100	142%	100%
	Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik	10	10	100%	100%

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi	Tingkat Capaian 2021	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	A	A	100%	100%

Dari keempat indikator sasaran diatas maka pencapaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target sasaran akhir Renstra sudah sesuai target pencapaian tahunnya untuk mencapai target akhir tersebut.

Pada pencapaian 4 indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021, dari target yang telah ditetapkan dapat tercapai 100% pada indikator prosentase potesi konflik agama yang terselesaikan dan prosentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan dengan target 70%, sedang indikator prosentase peningkatan angak partisipasi politik terealisasi 10% dari target 10%. Secara keseluruhan capaian kinerja indikator utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 100%.

Turunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Belanja Tidak Langsung

	Anggaran	Anggaran	%
I. PENDAPATAN ASLI DAERAH	123.477,00	1.164.718,91	943,27
1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	123.477,00	1.164.718,91	943,27
II. BELANJA	3.187.262.564,00	2.293.906.817,00	71,97
1. Belanja Tidak Langsung	1.696.699.177,00	1.097.924.311,00	64,71
1.1. Gaji dan Tunjangan PNS	1.334.939.177,00	837.372.013,00	62,73
1.2. Tambahan Penghasilan PNS	361.760.000,00	260.552.298,00	72,02
2. Belanja Langsung	1.490.563.387,00	1.195.982.506,00	80,24

## 2. Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2020 terdiri atas Program dan kegiatan dengan realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan. Adapun hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan tahun sampai dengan tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021 adalah sebagaimana tabel 2.1.2 berikut:



Tabel 2.1.2  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021  
Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
	Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
08.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.01.09	Kegiatan Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	80	80	80	100	80	240	0

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.09 .01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	-	8	6	6	100	6	20	0
1.05.1.05.01.09 .06	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Jumlah Peralatan Perkantoran	-	5	5	5	100	5	15	0
1.05.1.05.01.09 .07	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	-	5	5	5	100	5	15	0
1.05.1.05.01.09 .05	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	-	49	15	15	100	15	79	0
1.05.1.05.01.09 .08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah sarana dan Prasarana Perkantoran yang diadakan	-	2	4	4	100	1	7	0
8.01.01.2.06	Kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	80	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Jenis peralatan kantor	5	-	-	-	-	-	-	0



Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah jenis aset tetap kantor lainnya yang diadakan	4	-	-	-	-	-	-	0
8.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	80	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	6	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah jenis jasa komunikasi,SDA dan listrik yang tersedia	6	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan yang tersedia	6	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah jenis jasa pelayanan umum yang tersedia	6	-	-	-	-	-	-	0

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	80	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Jenis jasa pemeliharaan kendaraan dinas yang disediakan	5	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Jenis mebel yang dipelihara	5	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	5	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Jenis gedung yang bangunan yang dipelihara	5	-	-	-	-	-	-	0
1.05.1.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur mematuhi peraturan kedinasan OPD	-	80	80	100	125	100	280	0

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01 .05 .13	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya.	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan	-	33	22	15	68	24	72	0
1.05.1.05.01 .05 .11	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Kompetensi	-	14	15	17	113	24	55	0
8.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur atas layanan umum dan kepegawaian internal	80	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	0	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Aparatur Dalam peningkatan Kompetensi	24	-	-	-	-	-	-	0
1.05.1.05.01. 11	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	-	77	77	79	103	80	236	0

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.11 .08	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	-	9	9	9	100	9	27	0
1.05.1.05.01.11 .09	Fasilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	-	9	9	9	100	9	27	0
8.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	80,01	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	-	-	-	-	-	-	0

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	3	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	4	-	-	-	-	-	-	0
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi belanja	90	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	35	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD	3	-	-	-	-	1	1	33



Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	-	-	-	-	2	2	200
		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	3	-	-	-	-	3	3	100
		Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis rialisasi anggaran	2	-	-	-	-	4	4	200
1.05.1.05.01. 34	Program Pengembangan dan Pemantapan Ideologi, Politik dan Wawasan Kebangsaan	Prosentase potensi konflik agama yang ditindaklanjuti	-	100	65	100	154	70	270	0
		Prosentase Angka Partisipasi Politik	-	77	60	74,63	124	10	162	0
		Prosentase potensi konflik sosial dan politik yang ditindaklanjuti	-	100	65	100	154	70	270	0

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.34 .01	Pembinaan Ideologi Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah yang mengikuti Operasional dan Pembekalan Terhadap Anggota Korsik Pemerintahan Kabupaten Tuban	-	39	40	38	95	38	115	0
		Jumlah Peserta Gerakan Nasional Revolusi Mental	-	50	50	50	100	50	150	0
		Jumlah Peserta upacara bendera dan upacara peringatan hari besar lainnya	-	12.652	10.000	1.398	14	10.000	24.050	0
		Jumlah Peserta pembinaan penyelenggaraan kebangsaan	-	-	100	-	-	-	-	0
		Jumlah Peserta seminar peningkatan wawasan kebangsaan	-	-	100	-	-	-	-	0

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Peserta pembinaan kesadaran bela negara	-	-	50	-	-	-	-	0
		Jumlah Peserta peningkatan pembauran kebangsaan	-	-	100	-	-	-	-	0
		Jumlah Peserta pembinaan ideologi kebangsaan	-	-	100	-	-	-	-	0
		Jumlah Peserta sosialisasi pembumih Pancasila	-	-	100	-	-	-	-	0
08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Wawasan Kebangsaan	80	-	-	-	-	-	-	0
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaa Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Potensi Konflik sosial dan politik yang terselesaikan	70	-	-	-	-	-	-	0

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah yang mengikuti Operasional dan Pembekalan Terhadap Anggota Korsik Pemerintahan Kabupaten Tuban	0	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Peserta Upacara Bendera dan Hari- Hari Besar Nasional	1000	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Peserta Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	40	-	-	-	-	-	-	0
1.05.1.05.01.34 .06	Pembinaan Politik Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan sosialisasi forum diskusi politik	-	150	150	150	100	80	380	0
		Jumlah peserta sosialisasi forum- forum diskusi politik	-	150	150	150	100	150	450	0

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah partai politik yang diverifikasi	-	11	11	11	100	10	32	0
		Jumlah dokumen pemantauan perkembangan politik	-	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Rapat Koordinasi Tim Pemantau Perkembangan Politik	-	9	10	5	50	10	24	0
		Jumlah dokumen sidak Tim pemantauan perkembangan politik	-	4	4	0	0	4	8	0
08.01.03	Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase angka partisipasi pemilih	60	-	-	-	-	-	-	0

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase peningkatan angka partisipasi politik	10	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Peserta Sosialisai Pembinaan Partai Politik	33	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Dokumen Sidak Tim Pemantauan Perkembangan Politik	4	-	-	-	-	-	-	0

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah partai politik yang diverifikasi	11	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan politik (Dokumen)	6	-	-	-	-	-	-	0
1.05.1.05.01.34.03	Pengendalian Konflik Sosial	Jumlah laporan tenaga kerja asing, orang asing dan organisasi asing	-	2	2	2	100	0	4	0
		Jumlah laporanRapat Koordinasi tim kewaspadaan dini daerah	-	10	10	3	30	10	23	0
		Jumlah laporan rapat koordinasi pengendalian konflik sosial	-	2	12	3	25	12	17	0

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah laporan Rapat Koordinasi pengendalian tenaga kerja asing, orang asing dan organisasi asing	-	9	10	4	40	12	25	0
		Jumlah laporan Rapat Koordinasi peningkatan sistem deteksi dini terhadap konflik di masyarakat	-	-	12	-	-	-	-	0
		Jumlah peserta sosialisasi pengendalian konflik sosial	-	-	200	-	-	200	200	0
		Jumlah laporan pemantuan lapangan tim kewaspadaan dini daerah	-	-	5	5	100	0	5	0
		Jumlah laporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	-	-	2	1	50	0	1	0



Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah laporan rapat koordinasi dan pemantauan pengendalian tenaga kerja asing, orang asing dan organisasi asing	-	-	-	-	-	12	12	0
08.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualiats dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial dan politik yang ditindaklanjuti	75	-	-	-	-	13	13	17
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan nasioanal dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan	70	-	-	-	-	14	14	20
		Jumlah peserta sosialisasi pengendalian konflik sosial	200	-	-	-	-	15	15	8

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi kewaspadaan dini daerah	18	-	-	-	-	16	16	89
		Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi pengendalian konflik sosial	6	-	-	-	-	17	17	283
		Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi pemantauan pengendalian tenaga kerja asing, orang asing dan ormas asing	12	-	-	-	-	18	18	150
		Jumlah Peserta sosialisasi pengendalian konflik sosial	-	-	75	-	-	-	0	0
1.05.1.05.01.34 .05	Peningkatan Ketahanan Nilai Agama, Seni dan Kemasyarakatan	Jumlah kader dan relawan satgas P4GN	-	200	200	200	100	-	400	0

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah peserta pawai lintas agama, seni dan budaya	-	-	920	-	-	-	0	0
		Jumlah Peserta Pembinaan toleransi umat beragama	-	500	150	150	100	150	800	0
		Jumlah Peserta perbaikan proses politik yang beretika	-	0	75	0	0	0	0	0
		Jumlah Peserta Desiminasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	-	40	40	40	100	40	120	0
		Jumlah Peserta sosialisasi pembinaan terhadap ormas	-	80	80	-	-	-	80	0
		Jumlah Peserta sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan terhadap narkoba	-	-	150	-	-	-	0	0

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Peserta Desiminasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	-	-	40	-	-	-	0	0
		Jumlah Peserta Kirab Kebangsaan dan Pentas Seni	-	-	1.000	-	-	-	0	0
08.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Agama yang ditindaklanjuti	71	-	-	-	-	-	-	0
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Agama yang terselesaikan	70	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Peserta Pembinaan Toleransi umat Beragama	100	-	-	-	-	-	-	0
08.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Surat Keberadaan Ormas yang yang ditindaklanjuti	71	-	-	-	-	-	-	0

Kode.	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan dan Keluaran kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan	70	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Peserta sosialisasi pembinaan terhadap ormas	200	-	-	-	-	-	-	0

Secara umum untuk capaian kinerja/output yang dihasilkan dari masing-masing permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan antara lain:

1. Potensi Konflik agama dan sosial masih rentan terjadi, baik disebabkan terjadinya konflik kepentingan di dalam kelompok maupun pengaruh dari luar kelompok;
2. Pengarus derasnya informasi melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya yang rentan menimbulkan degradasi ideologi dan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa;
3. Terjadi Pandemi COVID 19 di Tahun 2020 tepatnya di mulai bulan Maret 2020 yang menyebabkan rentan terjadi potensi konflik sosial dimana banyak Perusahaan yang gulung tikar.

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

1. Telah terbentuknya FKDM Kabupaten Tuban sampai dengan tingkat kecamatan untuk pencegahan dan penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat dan juga telah terbentuknya FKUB di Kabupaten Tuban dalam rangka penyelesaian potensi konflik agama yang terjadi;
2. Menanamkan rasa cinta tanah air melalui kegiatan Upacara rutin 17an dan Upacara hari besar lainnya bagi aparat;
3. Memaksimalkan Forum Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Tuban dan Forum Kewaspadaan Dini Daerah tingkat kecamatan guna meredam potensi yang timbul.

#### 1.4 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Rekapitulasi realisasi Indikator Kinerja pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sebagian urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Tahun 2020 dan Tahun 2021, sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban

No	Indicator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Prosentase Penurunan Potensi Konflik Agama	-	-	-10	-	-	-	33	-	-	-	
	Prosentase Potensi Konflik Agama yang terselesaikan	-	-	-	65	70	70	-	100	100	100	
2.	Prosentase Penurunan Potensi Konflik Sosial dan Politik	-	-	-10	-	-	-	-50	-	-	-	
	Prosentase Potensi Konflik Sosial dan Politik yang terselesaikan	-	-	-	65	70	70	-	100	100	100	
3.	Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik	-	-	5	10	10	10	35,84	31,51	10	10	
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	B	BB	A	A	B	BB	A	A	

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Konflik sosial masih rentan terjadi, baik disebabkan terjadinya konflik kepentingan di dalam kelompok maupun pengaruh dari luar kelompok.
2. Pengarus derasnya informasi melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya yang rentan menimbulkan degradasi ideologi dan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.

Untuk bergerak menuju tujuan yang diharapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman SKPD dengan menggunakan analisa SWOT.

Berikut adalah identifikasi faktor-faktor lingkungan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strenghts*)
  - a. Kerjasama aparatur yang tinggi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. Dukungan anggaran yang memadai.
2. Kelemahan (*Weakness*)
  - a. Jumlah aparatur yang terbatas;
  - b. Urusan yang sangat luas yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Peluang (*Opportunities*)
  - a. Kerukunan antar umat beragama;
  - b. Masyarakat terdidik yang sadar berpolitik, dengan makin meningkatnya organisasi kemasyarakatan dan keikutsertaan dalam kegiatan politik;
  - c. keikutsertaan elemen masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pemahaman, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia; dan
  - d. Terbentuknya jejaring antara masyarakat, elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung kewaspadaan dini guna memperkuat rasa nasionalisme, pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara sehingga terwujud peningkatan rasa aman, nyaman dalam kebersamaan untuk pelaksanaan pembangunan.
4. Ancaman (*Threath*)
  - a. Perpecahan antar umat beragama;
  - b. Tingkat kesadaran berpolitik masyarakat yang masih belum merata;



- c. Belum seimbangnya hak dan kewajiban asasi masyarakat karena kurangnya pemahaman akan hak asasi manusia; dan
- d. Mulai lunturnya nasionalisme dan munculnya eksklusivitas kelompok-kelompok masyarakat yang akan mempertajam perbedaan.

#### 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2022 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2022 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2022 yang terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2022.

Adapun table review terhadap rancangan awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tuban tahun 2022 dapat dilihat tabel 2.4 berikut:

TABEL 2.4  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TUBAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	6,298,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	3,937,598	-
1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	80	200,000	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	80	140,683	-
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Perangkat Daerah	2	100,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Perangkat Daerah	2	99,759	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah dokumen Capaian Kinerja perangkat daerah	3	25,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah dokumen Capaian Kinerja perangkat daerah	3	2,525	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah dokumen HASIL Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	75,000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah dokumen HASIL Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	38,399	
2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	80	3,320,000	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	80	3,206,299	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah ASN	35	3,200,000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah ASN	35	3,112,017	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TUGAS ASN	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9	100,000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TUGAS ASN	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9	84,182	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9	5,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9	2.525	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9	5,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9	2.525	
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9	5,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9	2.525	
6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9	5,000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9	2.525	
3	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	80	160,000	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	80	0	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	35	50,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	35	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Aparatur dalam peningkatan kompetensi	21	110,000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Aparatur dalam peningkatan kompetensi	24	0	
4	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	80	293,000	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	80	273,657	
1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Jenis Peralatan Kantor	5	18,000	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Jenis Peralatan Kantor	5	13,449	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Jenis Peralatan Kantor	5	40,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Jenis Peralatan Kantor	5	29,998	
3	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Jenis Peralatan Kantor	-	0	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Jenis Peralatan Kantor	5	81,120	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Jenis Peralatan Kantor	5	40,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Jenis Peralatan Kantor	5	27,992	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Jenis Peralatan Kantor	5	5,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Jenis Peralatan Kantor	5	3,994	
6	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	40	190,000	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	40	117,104	
5	<i>Kegiatan pengadaan barang milik daerah pennunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	80	890,000	<i>Kegiatan pengadaan barang milik daerah pennunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	80	22,632	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	2	784,000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	2	0	
2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	1	50,000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	1	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
3	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	4	56,000	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	4	22,632	
6	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	80	200,000	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	80	148,557	
1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jasa administrasi perkantoran	6	15,000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jasa administrasi perkantoran	6	11,094	
2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, submer daya air dan listrik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jasa administrasi perkantoran	6	70,000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, submer daya air dan listrik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jasa administrasi perkantoran	6	52,420	
3	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jasa administrasi perkantoran	6	20,000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jasa administrasi perkantoran	6	14,980	-
4	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jasa administrasi perkantoran	6	95,000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jasa administrasi perkantoran	6	70,063	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
7	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	80	1,235,000	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	80	145,770	
1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	5	105,000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	5	78,977	
2	Sub Kegiatan pemeliharaan mebel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	5	10,000	Sub Kegiatan pemeliharaan mebel	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	5	5,000	
3	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	5	20,000	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	5	16,891	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
4	Sub Kegiatan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	5	1,100,000	Sub Kegiatan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	5	44,902	
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prosentase potensi konflik social dan politik yang ditindaklanjuti	70	820,000	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prosentase potensi konflik social dan politik yang ditindaklanjuti	70	704,175	-
1	<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideology Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Jumlah peserta upacara bendera, rencana aksi nasional</i>	<i>1040</i>	<i>820,000</i>	<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideology Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Jumlah peserta upacara bendera, rencana aksi nasional</i>	<i>1040</i>	<i>704,175</i>	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
1	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<i>Jumlah Yang Mengikuti Operasional Dan Pembekalan Terhadap Anggota KORSIK Pemerintah Kabupaten Tuban</i>	40	170,000	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<i>Jumlah Yang Mengikuti Operasional Dan Pembekalan Terhadap Anggota KORSIK Pemerintah Kabupaten Tuban</i>	0	0	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<i>Jumlah peserta gerakan nasional revolusimental</i>	100	600,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<i>Jumlah peserta upacara bendera dan hari-hari besar nasional</i>	1000	674,464	
		<i>Jumlahh peseerta kesadaran bela Negara</i>	100								
		<i>Jumlah peserta peningkatan pembauran kebangsaan</i>	100								
		<i>Jumlah peserta peningkatan wawasan kebangsaan</i>	100								

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
			<i>Jumlah peserta upacara bendera dan upacara peringatan hari besar lainnya</i>	10000							
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<i>Jumlah Peserta Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia</i>	40	50,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<i>Jumlah Peserta Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia</i>	40	29,711	
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik	10	1,225,086	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik	10	1,201,361	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
1	<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan</i>	4	1,225,086	<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan</i>	4	1,201,361	
1	Sub Kegiatan penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah peserta sosialisasi forum-forum diskusi politik	150	80,000	Sub Kegiatan penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah peserta sosialisasi pembinaan partai politik	33	15,032	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah					Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah					
2	Sub Kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah dokumen sidak tim pemantauan perkembangan politik	4	55,000	Sub Kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah dokumen sidak tim pemantauan perkembangan politik	4	20,368	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
3	Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah partai politik yang diverifikasi	11	1,050,086	Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah partai politik yang diverifikasi	11	1,006,639	
4	Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah dokumen rapat koordinasi tim pemantauan perkembangan politik	10	40,000	Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah dokumen rapat koordinasi tim pemantauan perkembangan politik	6	174,339	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah					Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah					
IV	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prosentase potensi konflik social dan politik yang ditindaklanjuti	70	450,000	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prosentase potensi konflik social dan politik yang ditindaklanjuti	70	408,310	
1	<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Jumlah peserta sosialisasi pembinaan terhadap ormas</i>	<i>200</i>	<i>450,000</i>	<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Jumlah peserta sosialisasi pembinaan terhadap ormas</i> <i>Jumlah desa mendapatkan asistensi pengelolaan keuangan desa</i>	<i>200</i>	<i>408,310</i>	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kecamatan yang dimonitoring dan di survey terkait organisasi kemasyarakatan di kabupaten tuban	20	450,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah peserta sosialisasi pembinaan terhadap ormas	200	408,310	
			Jumlah peserta ormas yang dibina dan diverifikasi melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	200							
V	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Social, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prosentase potensi konflik agama yang ditindaklanjuti	70	975,000	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Social, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prosentase potensi konflik agama yang ditindaklanjuti	70	159,554	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
1	<i>Kegiatan perrumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Jumlah peserta fasilitasi pembinaan toleransi umat beragama</i>	100	975,000	<i>Kegiatan perrumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>Jumlah peserta fasilitasi pembinaan toleransi umat beragama</i>	100	159,554	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Social, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah laopran rapat koordinasi terkait fasilitasi potensi konflik agama	12	975,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Social, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah peserta fasilitasi pembinaan toleransi umat beragama	100	159,554	
			Jumlah peseerta sosialisasi pembinaan toleransi umat beragama	500							

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prosentase potensi konflik agama yang ditindaklanjuti	70	650,000	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prosentase potensi konflik agama yang ditindaklanjuti	70	586,648	
1	<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>			<i>650,000</i>	<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	Jumlah dokumen hasil kegiatan	4	586,648	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah peserta sosialisasi pengendalian konflik social	200	80,000	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah peserta sosialisasi pengendalian konflik social	200	79,997	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah					Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah					
2	Sub Kegiatan pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah laporan koordinasi tim kewaspadaan dini daerah	10	400,000	Sub Kegiatan pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah dokumenfasilitasi dan koordinasi kewaspadaan dini daerah	18	399,953	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
3	Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah laporan rapat koordinasi dan pemantauan pengendalian tenaga kerja asing, orang asing dan ormas asing	12	154,000	Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi pengendalian konflik social	6	15,998	
4	Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan palaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen,	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi pemantauan pengendalian tenaga kerja asing, orang asing dan ormas asing	12	90,698	Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan palaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen,	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi pemantauan pengendalian tenaga kerja asing, orang asing dan ormas asing	12	90,700	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		
	Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah					Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah						
TOTAL					10,418,086	TOTAL					7,012,049	

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, dimana tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban di diskusikan dalam pembahasan Musrenbang RKPD Kabupaten. Program dan kegiatan masyarakat tidak terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, sehingga usulan program dan kegiatan masyarakat baik yang diusulkan dari kelompok masyarakat, Ormas/LSM, perguruan tinggi serta OPD Kabupaten tidak bisa disajikan. Adapun untuk penelaahan program dan kegiatan masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban terdapat nihil, sebagaimana table 2.5 berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Tuban

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>N I H I L</b>			

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Bidang tugas kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban meliputi urusan pemerintahan umum, terdiri dari:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

#### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan penyusunan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, diarahkan untuk membantu pencapaian tujuan politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Visi dan Misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tuban (RPJMD) Tahun 2021-2026, khususnya Misi ke satu, yang berbunyi : “Membangun dan Mewujudkan Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang terpadu, Partisipatif, Efektif, Berwawasan Lingkungan serta selaras dengan Pertumbuhan dan Pemerataan Sosial, Ekonomi dan Budaya, serta Bertumpu Pada Nilai-nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal”.

Permasalahan utama yang menjadi isu aktual Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu “Masih terdapat potensi konflik sosial, potensi konflik politik, potensi konflik agama serta degradasi ideologi dan wawasan kebangsaan”

Dari permasalahan utama tersebut, diupayakan untuk dapat ditangani dengan Tujuan perangkat daerah yaitu “Terwujudnya kerukunan umat beragama, kehidupan politik dan sosial” dan sasaran perangkat daerah yaitu “Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis”.

Penanganan terhadap sasaran yang merupakan tujuan dari terselesaikannya permasalahan utama, diukur melalui indikator sasaran sebagai berikut:

1. Prosentase Potensi Konflik Agama yang terselesaikan;
2. Prosentase Potensi Konflik Sosial dan Politik yang terselesaikan;
3. Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik.

Seluruh upaya penyelesaian permasalahan utama pada sasaran-sasaran yang ditetapkan, ditujukan untuk mendukung perwujudan misi kesatu Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih Tahun 2021-2026 Pembangunan yang kolaboratif, Tematik/Integratif, dan Spasial.

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat 6 (enam) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan yang diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
    3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;



3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
  6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan;
  5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  2. Pengadaan Mebel;
  3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  2. Pemeliharaan Mebel;

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan kegiatan:
    - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan:
      1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Idiologi Wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
      2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
      3. Pelaksaaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
  3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan kegiatan:
    - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan:
      1. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
      2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

3. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
4. Pelaksanaan Koordinasi Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan:
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan:
    1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, Dan Budaya, dengan kegiatan:
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, dengan sub kegiatan:
    1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan:
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan:
    1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah;

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah;
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah;
4. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan kegiatan prioritas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, yang menjadi pedoman penyusunan Program dan Kegiatan SKPD adalah Rancanagan Awal (Ranwal) Renstra SKPD Tahun 2021-2026, dimana di dalamnya telah termuat pokok-pokok Program dan Kegiatan berikut indikatornya yang menjadi tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.

Pada Tahun anggaran 2022, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas SKPD terdiri dari:

1. Penanganan potensi konflik agama;
2. Penanganan potensi konflik sosial;
3. Penanganan terhadap degradasi wawasan ideologi dan kebangsaan; dan
4. Pembinaan bela negara dan gerakan nasional revolusi mental.

Hal-hal prioritas tersebut, dituangkan dalam 5 (lima) program yaitu terdiri dari:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Budaya; dan
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Selain hal-hal prioritas, terdapat pula Program kegiatan rutin pelayanan administrasi. Adapun rincian Rencana Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban sebagaimana tabel 5 berikut:

TABEL 4.1  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TUBAN

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2023	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
8.01				Unsur Pemerintahan Umum								
8.01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A	3,937,598	APBD		A	6,592,000
8.01	01	2.01		<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	80	140,683	APBD		80	235,000
8.01	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	99,759	APBD		2	120,000
8.01	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Kinerja perangkat daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	2,525	APBD		3	30,000
8.01	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen HASIL Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	38,399	APBD		4	85,000

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2023	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
8.01	01	2.202		<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	80	3,206,299	APBD		80	3,660,000
8.01	01	2.202	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35	3,112,017	APBD		35	3,500,000
8.01	01	2.202	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TUGAS ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	84,182	APBD		9	120,000
8.01	01	2.202	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	2.525	APBD		9	10,000
8.01	01	2.202	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	2.525	APBD		9	10,000
8.01	01	2.202	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	2.525	APBD		9	10,000
8.01	01	2.202	08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	2.525	APBD		9	10,000

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2023	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
8.01	01	2.05		<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Jumlah aparatur	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24	0	APBD		24	120,000
8.01	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	APBD		0	0
8.01	01	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur dalam peningkatan kompetensi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	APBD		24	120,000
8.01	01	2.05		<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80	273,657	APBD		80	327,000
8.01	01	2.05	01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Peeralatan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	13,449	APBD		5	20,000
8.01	01	2.05	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatn dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peeralatan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	29,998	APBD		5	50,000
8.01	01	2.05	04	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Jenis Peeralatan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	81,120	APBD		0	0



Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2023	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
8.01	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Peeralatan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	27,992	APBD		5	50,000
8.01	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Peeralatan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	3,994	APBD		5	7,000
8.01	01	2.06	09	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40	117,104	APBD		40	200,000
8.01	01	2.07		<i>Kegiatan pengadaan barang milik daerah pennunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>80</i>	<i>22,632</i>	<i>APBD</i>		<i>80</i>	<i>860,000</i>
8.01	01	2.07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	0	APBD		2	800,000
8.01	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	0	APBD		0	0
8.01	01	2.07	07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	22,632	APBD		4	60,000

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2023	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
8.01	01	2.08		<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	80	148,557	APBD		80	240,000
8.01	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa administrasi perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11,094	APBD		6	20,000
8.01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, submer daya air dan listrik	Jumlah jasa administrasi perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	52,420	APBD		6	80,000
8.01	01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa administrasi perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	14,980	APBD		6	25,000
8.01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa administrasi perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	70,063	APBD		6	115,000
8.01	01	2.09		<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik (Aparatur)</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	80	145,770	APBD		80	1,150,000

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2023	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
8.01	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	78,977	APBD		5	110,000
8.01	01	2.09	05	Sub Kegiatan pemeliharaan mebel	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	5,000	APBD		5	15,000
8.01	01	2.09	06	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	16,891	APBD		5	25,000
8.01	01	2.09	09	Sub Kegiatan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	44,902	APBD		5	1,000,000
8.01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase potensi konflik social dan politik yang ditindaklanjuti	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70	704,175	APBD		70	774,593

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2023	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
8.01	02	2.01		<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideology Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Jumlah peserta upacara bendera, rencana aksi nasional</i>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1040	704,175	APBD		1040	774,593
8.01	02	2.01	02	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah Yang Mengikuti Operasional Dan Pembekalan Terhadap Anggota KORSIK Pemerintah Kabupaten Tuban</i>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	APBD		0	0
8.01	02	2.01	04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah peserta upacara bendera dan hari-hari besar nasional</i>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1000	674,464	APBD		1000	741,910

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2023	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
8.01	02	2.01	05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideology Wawsan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah Peserta Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia</i>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40	29,711	APBD		40	32,682
8.01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	1,201,361	APBD		10	1,338,016
8.01	03	2.01		<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Pollitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan</i>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	1,201,361	APBD		4	1,338,016

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2023	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
8.01	03	2.01	01	Sub Kegiatan penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah peserta sosialisasi pembinaan partai politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33	15,032	APBD		33	16,535
8.01	03	2.01	03	Sub Kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah dokumen sidak tim pemantauan perkembangan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	20,368	APBD		4	22,405
8.01	03	2.01	04	Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah partai politik yang diverifikasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	1,006,639	APBD		11	1,107,303

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2023	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
8.01	03	2.01	05	Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah dokumen rapat koordinasi tim pemantauan perkembangan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	174,339	APBD		6	191,772
8.01	04			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase potensi konflik social dan politik yang ditindaklanjuti	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70	408,310	APBD		70	449,148
8.01	04	2.01		<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya</i>	<i>Jumlah peserta sosialisasi pembinaan terhadap ormas</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>200</i>	<i>408,310</i>	APBD		<i>200</i>	<i>449,148</i>
8.01	04	2.01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi pembinaan terhadap ormas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	200	408,310	APBD		200	449,148

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2023	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
8.01	05			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Social, Dan Budaya	Prosentase potensi konflik agama yang ditindaklanjuti	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70	159,554	APBD		70	175,509
8.01	05	2.01		<i>Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya</i>	<i>Jumlah peserta fasilitasi pembinaan toleransi umat beragama</i>	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>100</i>	<i>159,554</i>	APBD		<i>100</i>	<i>175,509</i>
8.01	05	2.01	03	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah peserta fasilitasi pembinaan toleransi umat beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	159,554	APBD		100	175,509
8.01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase potensi konflik agama yang ditindaklanjuti	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70	586,648	APBD		70	795,000
8.01	06	2.01		<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial</i>	Jumlah dokumen hasil kegiatan	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	<i>4</i>	<i>586,648</i>	APBD		<i>4</i>	<i>795,000</i>



Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2023	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
8.01	06	2.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi pengendalian konflik social	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	200	79,989	APBD		200	100,000
8.01	06	2.01	03	Sub Kegiatan pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah dokumenfasilitasi dan koordinasi kewaspadaan dini daerah	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	18	399,953	APBD		18	500,000
8.01	06	2.01	04	Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi pengendalian konflik social	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	6	15,998	APBD		6	20,000

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2023	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
8.01	06	2.01	05	Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan palaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama INTELEJEN, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi pemantauan pengendalian tenaga kerja asing, orang asing dan ormas asing	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	90,700	APBD		12	175,000

BAB V  
PENUTUP

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2022 merupakan dokumen acuan bagi pelaksanaan pengembangan seluruh kegiatan satuan kerja. Renja SKPD ini disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dan peraturan Perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Renja SKPD ini diharapkan Pimpinan SKPD dapat menentukan langkah berupa kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban akan berjalan secara lebih terarah dan teratur.

Renja SKPD ini disusun dengan indikasi penggunaan dana sesuai dengan Rencana Strategis SKPD dan belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan anggaran sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Demikian penyusunan Renja SKPD ini untuk menjadi pedoman operasional guna menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergitas. Mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang ada, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan dan perubahan terhadap Renja SKPD yang telah ditetapkan ini.

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY